



EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024



**KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru
Kode Pos 71114



BUPATI TAPIN

Executive Summary

Disampaikan pada :

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin

Tahun Anggaran 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tapin,

Yang Kami Hormati,

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin;
2. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tapin;
3. Wakil Bupati Tapin;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin,
5. Para Staf Ahli Bupati Tapin dan Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
6. Inspektur Kabupaten Tapin, Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin, Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat Se Kabupaten Tapin, dan Direktur RSUD Datu Sanggul;
7. Para Wartawan Media Cetak dan Elektronik.

Hadirin Hadirat sekalian yang berbahagia...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir pada hari ini untuk bersilaturahmi dan mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin Tahun Anggaran 2024.

Tak lupa pula ucapan shalawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 ini merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka transparan, akuntabel, dan menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun disetujui bersama dalam Perda Penetapan APBD dan Perubahan APBD.

Sifat dari LKPJ adalah informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dari 1 Januari sd 31 Desember 2024, sebagai bahan bagi DPRD dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan. Kami menyadari bahwa LKPJ yang kami sampaikan di hadapan Dewan Yang Terhormat ini tentu masih belum sempurna, namun kami berharap semoga hal ini tidak mengurangi arti dan makna laporan ini.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Penyusunan LKPJ Bupati Tapin Tahun Anggaran 2024 secara teknis, substansi dan sistematika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Sedangkan secara Program, Kegiatan dan Keuangan dengan mempedomani pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024 yaitu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun ruang lingkup substansi LKPJ Bupati Tapin adalah laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kewenangan daerah melalui Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah ditambah penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapin atas LKPJ Bupati Tapin Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Strategis yang diambil Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan selama tahun 2024.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Secara Garis Besar LKPJ Tahun 2024 ini saya sampaikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kabupaten Tapin sebagaimana yang tercantum

dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah VISI:

“ TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”

Sejumlah upaya yang dimaksud pada visi dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Tahun 2024 pembangunan Kabupaten Tapin menjadi agenda pelaksanaan tahun pertama dokumen RPD Kabupaten Tapin. Sehingga sangat penting sebagai langkah awal kita mempersiapkan pembangunan di berbagai bidang agar setahap demi tahap mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga masyarakat Kabupaten Tapin lebih sejahtera, makmur dan bahagia. Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kabupaten Tapin mampu mendukung secara optimal pencapaian target

pembangunan Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Tapin dalam RPD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Tapin pada tahun 2024 adalah **"Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Masyarakat"** Tema tersebut dijabarkan pada empat belas prioritas daerah yaitu:

1. Pengembangan kawasan pendidikan berbasis IT;
2. Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan;
3. Optimalisasi diversifikasi pertanian;
4. Pengembangan perkebunan kerakyatan;
5. Peningkatan iklim investasi daerah;
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan;
8. Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup;
9. Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah;
10. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
11. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
12. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;
13. Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin; dan
14. Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin mengalami peningkatan, pada tahun 2023 adalah 73,52 menjadi 74,06 pada tahun 2024. IPM Kabupaten Tapin pada tahun 2024 berada pada urutan keenam dari tiga belas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yaitu setelah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun perkembangan dimensi penyusun IPM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,25 tahun. Pada 2023, UHH Kabupaten Tapin adalah 74,47 tahun dan pada 2024 mencapai 74,72 tahun. Pada tahun 2024 UHH Kabupaten Tapin berada di urutan ke empat dari tiga belas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini mengalami peningkatan walau tidak terlalu signifikan. HLS 2024 sebesar 12,34 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan 2023 sebesar 12,33 tahun. Sementara RLS 2024 sebesar 8,15 tahun, meningkat 0,1 tahun dibanding tahun 2023 sebesar 8,05 tahun.
3. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin pada tahun 2024 menduduki urutan ke delapan sebesar 12,34. Angka tersebut

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang semula menduduki urutan ke tiga belas dari tiga belas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,04. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan Angka Harapan Sekolah Tertinggi adalah Kota Banjarbaru yaitu 14,86. Hal ini merupakan hasil kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin tahun 2024 mengalami peningkatan, dari 3,19% menjadi 3,33% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.554 orang pada tahun 2024. Kenaikan persentase penduduk miskin salah satunya disebabkan oleh inflasi dan kenaikan harga pokok yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sangat mempengaruhi daya beli masyarakat di Kabupaten Tapin. Kenaikan harga bahan pokok yang tajam menyebabkan banyak keluarga berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang akhirnya berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Tapin tahun 2024 sebesar Rp. 561.101,- per kapita per bulan. Hal ini berarti seorang penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran makanan dan non makanannya kurang dari Rp. 561.101,- per bulan atau Rp 18.703,- per hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu naik sekitar Rp. 44.569,-. Menindaklanjuti dari kenaikan persentase penduduk miskin dan garis

kemiskinan di Kabupaten Tapin pada tahun 2024, Hal ini menunjukkan bahwa harus ada usaha maksimal untuk lebih focus bersinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan 10 Aspek Capaian Indikator Prioritas Nasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tapin Tahun 2024 yaitu :

1. Aspek Inflasi

Kabupaten Tapin bukan merupakan daerah penghitung inflasi, akan tetapi merupakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Tapin pada bulan September mengalami penurunan harga sebesar -0,58, pada bulan Oktober mengalami penurunan harga sebesar -0,98 dan bulan November 2024 IPH Kabupaten Tapin mengalami kenaikan harga sebesar 1,63 dan berada di posisi tertinggi dari delapan kabupaten penghitung IPH. komoditas yang mendorong terjadi kenaikan harga dengan andil harga terbesar pada komoditas bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Tapin Melalui Strategi 4K Yaitu :

1. Keterjangkauan harga, yaitu pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah dan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat miskin;

2. Ketersediaan pasokan, yaitu kegiatan panen raya di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan, gerakan tanam cabai rawit hiyung, percepatan tanam bibit padi Kecamatan Piani dan pembangunan irigasi dan sumur untuk kelancaran pertanian dan panen jagung;
3. Kelancaran distribusi yaitu pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dan distribusi belanja tidak terduga ke kecamatan;
4. Komunikasi efektif yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi, high level meeting, neraca pangan dan sistem informasi kelompok barang berupa bahan makanan untuk pemantauan gejolak harga pada musim panen.

Upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi dengan mengalokasikan anggaran BTT dan rencana kegiatan pengendalian inflasi pada tahun 2024 adalah sebesar empat milyar rupiah dalam bentuk program dan kegiatan berupa:

1. Pelaksanaan pasar murah;
2. Operasi pasar murah;
3. Operasional tim pengendalian inflasi daerah
4. Bantuan langsung tunai

Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan langkah jangka pendek dengan tetap melaksanakan operasi pasar murah dan jangka panjang dengan meningkatkan produksi dan pasokan komoditas.

2. Aspek Stunting

Jumlah stunting di Kabupaten Tapin adalah 1.449 jiwa atau

13,6 persen dengan jumlah balita yang diukur adalah 11.743 jiwa dengan persentase 93,90 persen.

Capaian Kinerja penurunan stunting Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Triwulan I, Stunting berjumlah 1.311 jiwa dengan persentase 13,6 persen;
- 2) Triwulan II, Stunting berjumlah 1.496 jiwa dengan persentase 13,24 persen;
- 3) Triwulan III, Stunting berjumlah 1.577 jiwa dengan persentase 12,75 persen;
- 4) Triwulan IV Stunting berjumlah 1.449 jiwa dengan persentase 12,34 persen.

Pada Triwulan IV Prevelensi Stunting terjadi penurunan di bandingkan pada Triwulan III, yakni dari angka 12,75 persen menjadi 12,34 persen. Pada saat ini berbagai upaya terus dilaksanakan, guna menurunkan prevalensi stunting seperti peningkatan kompetensi kader kesehatan dalam penggunaan alat antropometri di posyandu, sosialisasi pelayanan kesehatan primer terintegrasi dan lain sebagainya.

Upaya Yang telah dilakukan dalam penurunan stunting adalah:

1. Screening Anemia;
2. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
3. Pemeriksaan kehamilan
4. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
5. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu KEK
6. Pemantauan Tumbuh Kembang
7. ASI Eksklusif, Vit A, Pemberian Obat Kecacingan

8. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita
9. Tatalaksana Balita dan Perluasan Jenis Imunisasi
10. Penerimaan Bnatuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Sosial
11. Desa / kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Upaya Yang akan dilakukan dalam penurunan stunting adalah:

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat;
2. Penanggulangan Gizi buruk
3. Tatalaksana Gizi buruk;
4. Peningkatan kapasitas petugas sebagai konselor menyusui;
5. Peningkatan kapasitas petugas pemberi makanan bayi dan anak;
6. Pengawasan minum obat tablet tambah darah ibu hamil dan remaja
7. Pengawasan minum obat tablet tambah darah ibu hamil dan remaja di 75 desa lokus; dan
8. Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.

3. Aspek BUMD

Ada dua BUMD di Kabupaten Tapin di kategorikan sehat yaitu PDAM dan Bank Tapin, kedua BUMD tersebut berdasarkan hasil audit pada Januari 2024. PDAM Kabupaten Tapin sudah dilaksanakan pemeriksaan untuk tahun buku 2023 oleh BPKP di Bulan April 2024 dan Mendapatkan Nilai 3,45 Dengan Kategori "Sehat", Untuk PT. BPR TAPIN SEJAHTERA Di Audit Oleh KAP Erfan dan Rakhmawan untuk tahun buku 2023.

PDAM yaitu BUMD yang melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Tapin. Pada laporan keuangan PDAM yang berakhir pada 31 Desember 2024 menunjukkan laba PDAM sebesar

Rp. 3.829.846.886.

BPR Tapin Sejahtera yaitu BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan. Pada laporan keuangan BPR yang berakhir pada 31 Desember 2014 menunjukan laba sebesar Rp. 1.862.280.308,80.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BUMD kedepannya adalah pemantauan terkait kinerja pada BUMD dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi rutin di setiap triwulan dan melaksanakan pembinaan good corporate governance BUMD.

4. Aspek Layanan Publik

Berdasarkan SK Bupati Tapin Nomor 188.45/285/Kum/2022 Tentang SOP Perizinan Dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tapin terdapat sejumlah 1.066 sop yang diklasifikasikan dalam 12 sektor urusan.

Pada 14 November 2024, Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten meraih Predikat A dengan nilai 94,77 (Zona Hijau) berada di peringkat 75 Se-Indonesia. Kabupaten Tapin pada 11 Desember 2024 juga mendapatkan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dengan Nilai 94,77 Predikat A.

Upaya yang telah dilakukan dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Tapin yaitu untuk OPD yang melaksanakan pelayanan publik yaitu adanya SOP pada setiap layanan, memberikan pelayanan gratis, kualitas hasil pelayanan OPD pelayanan dengan nilai sangat baik dan baik, penerapan digitalisasi dalam proses

pelayanan publik. Dengan demikian semoga pelayanan publik di Kabupaten Tapin dapat semakin meningkat untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Tapin.

5. Aspek Pengangguran

Angka Pengangguran Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sejumlah 3.997 orang menjadi sejumlah 3.911 orang tahun 2024, angka pengangguran ini mengalami penurunan sebesar 86 orang. Angka Pengangguran Kabupaten Tapin berada pada posisi ketiga terendah jumlah angka pengangguran Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapin pada Tahun 2024 sebesar 3,86 persen, hal ini menunjukkan penurunan sebesar 0,7 point dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 3,93 persen.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi pengangguran adalah meningkatkan informasi pasar kerja, memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Tapin dan meningkatkan paket pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.

Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi pengangguran adalah :

1. Melakukan pemetaan Tingkat Pengangguran Terbuka Per Desa/Lurah, relevansinya pelatihan yang dilaksanakan di sesuaikan dengan kebutuhan/ potensi yang ada.
2. Membuat kelompok kerja dalam rangka peningkatan skill menuju tenaga kerja mandiri.
3. Melaksanakan pelatihan-pelatihan di balai latihan kerja (BLK) berupa pelatihan menjahit, pembuatan kue, tata kecantikan, dan

computer operator asisten.

4. Menyampaikan informasi pasar kerja dan formasi peluang kerja.
5. Melakukan kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tapin untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal.
6. Melaksanakan kegiatan JOB FAIR

6. Aspek Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Pada tahun 2024 Triwulan IV data kemiskinan ekstrem Kabupaten Tapin sebanyak 259 KK. Hal ini menunjukkan penurunan dibanding pada tahun 2023 sebanyak 926 KK.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemiskinan Ekstrem. Bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000,- per jiwa/bulan selama 9 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Sosial kepada keluarga miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan ini disalurkan melalui kantor pos dan diberikan secara langsung (Door to Door) kepada keluarga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrem (E-TAPIN MESRA). BST-KE membantu keluarga untuk bertahan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan

ekstrem yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tunai disalurkan kepada keluarga atau individu yang benar-benar membutuhkan, yaitu mereka yang berada dalam kategori Miskin Ekstrem. Evaluasi akan mengevaluasi apakah data penerima manfaat sudah sesuai dan tepat, serta apakah ada kesalahan dalam penyaluran yang perlu diperbaiki.

7. Aspek Kesehatan

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit Datu Sanggul data per Desember tahun 2024 sebanyak 23 orang yang terdiri dari 15 jenis layanan spesialis.

Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Kesehatan Anak, dan Bedah. Adapun Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik dan Patologi Anatomi. Serta Pelayanan Medik Spesialis Lain terdiri dari Pelayanan Mata, THT, Syaraf, Jiwa, Paru, Kulit dan Psikologi. Serta Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut yang terdiri dari Pelayanan Konservasi Gigi. Dimana sampai dengan sekarang untuk pemenuhan tenaga spesialis dasar secara minimal sudah terpenuhi 100%.

Adapun sarana dan prasarana pada rumah sakit, yaitu :

1. Jumlah alat kesehatan yang terdapat di RSUD Datu Sanggul sebanyak 543 buah
2. Jumlah peralatan kesehatan yang terdapat di RSUD Datu Sanggul sebanyak 1.357 buah

3. Mobil dinas dengan jumlah 17 unit
4. Rumah dinas baru berjumlah 13 unit

Upaya yang telah dilakukan untuk fasilitasi dokter spesialis dan kelengkapan sarana prasarana rumah sakit menyediakan fasilitas berupa rumah dinas dilengkapi dengan peralatan rumah tangga, dibebaskan dari biaya listrik dan PDAM, ditambah dengan fasilitas berupa mobil dinas serta biaya pemeliharannya, serta terus meningkatkan penyediaan alat kesehatan.

8. Aspek Penyerapan Anggaran

Pada Tahun 2024 Penyerapan Pendapatan di Kabupaten Tapin pada tahun 2024 adalah :

- 1) Triwulan I, Anggaran Rp. 2.139.375.625.965,00 Realisasi Rp. 737.182.756.539,17 (34%)
- 2) Triwulan II, Anggaran Rp. 2.139.375.625.965,00 Realisasi Rp 1.256.395.535.752,39 (59%)
- 3) Triwulan III, Anggaran Rp 2.139.375.625.965,00 Realisasi Rp. 1.771.371.294.322,56 (83%)
- 4) Triwulan IV, Anggaran Rp 2.916.072.334.645,00 Realisasi Rp. 2.332.104.432.806,88 (80%)

Sedangkan untuk Penyerapan Belanja di Kabupaten Tapin pada tahun 2024 adalah :

- 1) Triwulan I, Anggaran Rp. 2.630.464.977.896,00 Realisasi Rp. 455.388.897.652,00 (17,31%);
- 2) Triwulan II, Anggaran Rp. 2.360.633.597.164,00 Realisasi Rp. 840.084.334.919,00 (35,59%);
- 3) Triwulan III, Anggaran Rp. 2.360.633.597.164,00 Realisasi Rp. 1.403.765.750.309,59 (59,47);

4) Triwulan IV, Anggaran Rp. 2.841.906.230.288,00 Realisasi Rp. 2.013.072.398.630,59 (70,84%).

Upaya yang telah dilakukan agar penyerapan sesuai dengan target dari Kementerian dalam Negeri :

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien dan akuntabel.
- b. Menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah dalam rangka percepatan penyerapan belanja.
- c. Memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pelayanan Masyarakat.
- d. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan optimalkan pelelangan secara elektronik.
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring progres penyelesaian kegiatan.
- f. Pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2024 akan menyelesaikan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 58.831.163.012 beserta bunganya sebesar Rp. 3.404.363.388 kepada PT. SMI.

Upaya yang akan dilakukan agar penyerapan sesuai dengan target dari Kementerian Dalam Negeri :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut.
- b. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
- c. Memastikan akurasi data terkait belanja bantuan sosial dan kemiskinan ekstrim.
- d. Melakukan pertemuan setiap triwulan untuk mengidentifikasi

kendala, menemukan solusi, serta merumuskan tindaklanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan APBD.

- e. Meningkatkan modernisasi dan digitalisasi dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan keuangan.

9. Aspek Kegiatan Unggulan

10 kegiatan unggulan yang terdapat pada RKPD, RPD DAN APBD Kabupaten Tapin, yaitu :

- 1) Pengembangan kawasan pendidikan dan pelatihan di Kecamatan Tapin Selatan;
- 2) Pemberian pelayanan home care untuk tokoh masyarakat (ulama, tokoh masyarakat);
- 3) Penurunan stunting;
- 4) Penguatan data riset dan inovasi dalam proses pembangunan daerah, adanya hasil riset sebagai dasar penyusunan program kegiatan;
- 5) Pembangunan Minimal Pilot Projek Kecamatan Binuang Dan Kecamatan Candi Laras Utara;
- 6) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Penguatan Pengamanan Data Digital Melalui CSRT;
- 7) Membuka pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan ruas jalan Pandahan – Margasari;
- 8) Pembangunan ruas jalan Binuang - Batu Hapu menuju Geopark Meratus;
- 9) Pengembangan kawasan perdesaan Di Kecamatan Tapin Tengah, Bakarangan, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan;
- 10) Penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan telah menyelesaikan penyusunan Masterplan Kawasan Pendidikan dan melakukan pembebasan lahan seluas 5 ha untuk keperluan kawasan pendidikan sains dan teknologi. Pada Tahun 2025 akan melakukan pembebasan lahan tahap 2 untuk kemudian dapat diteruskan dengan proses pembangunan kawasan pendidikan, sains dan teknologi.
2. Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kesehatan dan 13 Puskesmas yang berada di 12 Kecamatan telah melaksanakan pemberian layanan kesehatan *home care* yang mana kegiatan ini akan berlanjut di tahun 2025.
3. Dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Tapin, tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Tapin telah melaksanakan Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Strategi penurunan stunting dengan melaksanakan aksi konvergensi stunting yang saat ini telah menyelesaikan aksi ke-7 dan dalam tahap penyelesaian aksi ke -8 konvergensi stunting.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan cara pemanfaatan data riset dan inovasi dalam proses pembangunan daerah, dimana hasil riset akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan, pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pembentukan badan perencanaan, pembangunan dan riset daerah (BAPPERIDA) yang saat ini telah masuk pada tahap pengusulan Propemperda tahun

2025 tentang pembentukan Bapperida.

5. Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Tapin membangun dua Mini Mall Pelayanan sebagai pilot proyek Kecamatan Binuang dan Candi Laras Selatan yang saat ini proses pembangunan fisik tahap 1 telah selesai dilaksanakan dan proses pembangunan fisik tahap 2 akan dilaksanakan di tahun 2025.
6. Dalam rangka peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta penguatan pengamanan data digital melalui CSRT, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika telah melaksanakan pelatihan kepada 45 OPD, dan pelatihan ini akan kembali dilakukan di tahun 2025.
7. Untuk meningkatkan sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pembukaan ruas jalan Pandahan - Margasari dan Binuang Batu Hapu, yang mana tahap 1 pembukaan kedua ruas jalan tersebut telah diselesaikan dan akan dilanjutkan dengan pengerjaan tahap 2 di tahun 2025 sehingga diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya sektor perekonomian namun juga sektor pariwisata di Kabupaten Tapin.
8. Pemerintah Kabupaten Tapin mengembangkan kawasan perdesaan yang berlokasi di Kecamatan Tapin Tengah, Bakarangan, Candi Laras Utara Dan Candi Laras Selatan. Saat ini kawasan perdesaan tersebut telah ditetapkan.
9. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah Kabupaten Tapin terus berusaha

untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrem secara rutin setiap bulannya. Dan kegiatan ini akan dilanjutkan di tahun 2025 sebagai komitmen dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

10. Aspek Perizinan

Total jenis layanan berjumlah 155 layanan dengan total jumlah ijin yang dikeluarkan adalah 2.924 ijin terdiri dari 2.124 izin OSS, 747 izin perizinan non berusaha dan PBG sebanyak 54 izin.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk kemudahan perizinan :

- 1) Tersedianya Perbup pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Aplikasi Mal Pelayanan Publik digital telah diterapkan;
- 3) SOP Mal Pelayanan Publik telah ditetapkan, yaitu Keputusan Bupati Tapin Nomor : 100.3.3.2/40/KUM/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Mall Pelayanan Publik;
- 4) Tersedianya layanan *helpdesk* perizinan untuk masyarakat, orang ataupun badan usaha;
- 5) Tersedianya pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan: Peraturan Bupati Tapin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 6) Tersedianya SOP dan SP Perizinan:
- a) Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/285/KUM/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin;
 - b) Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/286/KUM/2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- 7) Hasil SKM MPP triwulan III 2024 dengan nilai 85,96 kategori baik
- Adapun upaya yang akan dilakukan untuk kemudahan perizinan :
- 1) Peningkatan pelayanan perizinan baik pada DPMPTSP maupun Mall Pelayanan Publik
 - 2) Updating regulasi terkait perizinan yaitu : Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Berbasis Risiko (Proses Revisi, Di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan);
 - 3) Updating regulasi terkait insentif penanaman modal yaitu peraturan daerah tentang pemberian insentif fasilitasi kemudahan di bidang penanaman modal (proses harmonisasi ke Kemenkumham kemudian pembahasan dengan DPRD Kabupaten Tapin)

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Pada bidang ekonomi dapat kami sampaikan, bahwa Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 sebesar 14,40 Milyar Rupiah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan sebesar 7,59 Milyar Rupiah. Begitu pula PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 72,44 Juta Rupiah, serta tentang Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebesar Rp. 3.282.812,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 3.149.977,65.

C. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Target Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 2.916.072.334.645,00 dan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 (unaudited) adalah sebesar Rp. 2.310.107.796.596,99 atau 79,22 persen dari target pendapatan.

Besaran target ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 107.385.023.159,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 114.046.175.921,88 atau 106,20 persen, target dana pendapatan transfer sebesar Rp. 2.170.228.964.437,00 dan telah realisasi sebesar Rp. 2.208.405.337.539,00 atau 101,76 persen dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 638.458.347.049,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.652.919.346,00 atau 1,51 persen.

D. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 2.842.129.248.288,00 dan jumlah Realisasi Belanja Daerah

sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 (unaudited) adalah sebesar Rp. 2.239.567.363.452,59 atau sebesar 78,80 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

LKPJ yang disampaikan ini pada dasarnya *progress report* atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tapin Tahun 2024, dimana pada keseluruhan isinya mencantumkan target (alokasi dana) serta realisasi dana/keuangan, realisasi fisik, serta realisasi pencapaian program dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun capaian kinerja untuk anggaran dan realisasi dari belanja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin selama tahun anggaran 2024 dari capaian realisasi tertinggi sampai terendah dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Anggaran Rp. 81.794.327.034,00 Realisasi Rp. 80.516.660.904,00 atau 98,44%
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Anggaran Rp. 288.595.467.688,00 Realisasi Rp. 281.069.344.284,00 atau 97,39%
3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Pertanahan dengan Anggaran Rp. 108.936.711.721,00 Realisasi

Rp. 105.457.138.658,00 atau 96,81%

4. Kecamatan Tapin Utara dengan Anggaran Rp. 10.576.662.532,00
Realisasi Rp. 10.233.022.434,00 atau 96,75%
5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dengan Anggaran
Rp. 86.737.369.644,00 Realisasi Rp. 82.738.072.556,00 atau
95,39%
6. Kecamatan Binuang dengan Anggaran Rp. 8.986.292.810,00
Realisasi Rp. 8.539.556.709,00 atau 95,03%
7. Dinas Kesehatan dengan Anggaran Rp. 223.258.279.482,00
Realisasi Rp. 211.400.027.246,00 atau 94,69 %
8. Kecamatan Piani dengan Anggaran Rp. 3.432.995.012,00 Realisasi
Rp. 3.234.767.571,00 atau 94,23%
9. Kecamatan Salam Babaris dengan Anggaran
Rp. 2.505.609.651,00 Realisasi Rp. 2.357.408.716,00 atau
94,09%
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan
Anggaran Rp. 15.427.114.279,00 Realisasi Rp. 14.481.611.620,00
atau 93,87%
11. Kecamatan Hatungun dengan Anggaran Rp. 3.908.876.015,00
Realisasi Rp. 3.664.163.870,00 atau 93,74%
12. Kecamatan Bungur dengan Anggaran Rp. 3.470.446.636,00
Realisasi Rp. 3.241.417.887,00 atau 93,4%
13. Kecamatan Tapin Tengah dengan Anggaran
Rp. 3.213.672.125,00 Realisasi Rp. 2.995.739.403,00 atau
93.22%
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Anggaran
Rp. 10.786.055.024,00 Realisasi Rp. 10.036.147.872,00 atau

93,05%

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Anggaran Rp. 11.782.168.237,00 Realisasi Rp. 10.939.688.060,00 atau 92,85%
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Anggaran Rp. 20.874.724.811,00 Realisasi Rp. 19.366.740.394,00 atau 92,78 %
17. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Anggaran Rp. 20.305.941.482,00 Realisasi Rp. 18.840.656.268,00 atau 92,78%
18. Kecamatan Tapin Selatan dengan Anggaran Rp. 5.281.256.798,00 Realisasi Rp. 4.874.325.072,00 atau 92,29%
19. Kecamatan Lokpaikat dengan Anggaran Rp. 4.249.380.870,00 Realisasi Rp. 3.901.011.869,00 atau 91,8%
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Anggaran Rp. 6.387.702.739,00 Realisasi Rp. 5.859.598.523,00 atau 91,73%
21. Kecamatan Candi Laras Selatan dengan Anggaran Rp. 3.258.393.756,00 Realisasi Rp. 2.975.223.457,00 atau 91,31%
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Anggaran Rp. 7.963.134.905,00 Realisasi Rp. 7.197.390.519,00 atau 90,38%
23. Kecamatan Candi Laras Utara dengan Anggaran Rp. 5.325.224.062,00 Realisasi Rp. 4.805.578.955,00 atau 90,24%

24. Dinas Ketahanan Pangan dengan Anggaran Rp. 7.282.945.015,00
Realisasi Rp. 6.560.743.580,00 atau 90,08%
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Anggaran
Rp. 44.732.958.126,00 Realisasi Rp. 40.246.572.894,00 atau
89,97%
26. Dinas Perindustrian dengan Anggaran Rp. 9.338.228.859,00
Realisasi Rp. 8.357.975.018,00 atau 89,5%
27. Dinas Sosial dengan Anggaran Rp. 24.468.595.282,00 Realisasi
Rp. 21.781.632.016,00 atau 89,02%
28. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Anggaran
Rp. 13.679.066.109,00 Realisasi Rp. 11.852.691.956,00 atau
86,65%
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Anggaran
Rp. 6.787.740.391,00 Realisasi Rp. 5.851.471.000,00 atau
86,21%
30. Dinas Lingkungan Hidup dengan Anggaran
Rp. 38.824.309.101,00 Realisasi Rp. 33.114.011.116,00 atau
85,29%
31. Badan Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Rp. 12.276.818.590,00 Realisasi Rp. 10.469.744.161,00 atau
85,28%
32. Dinas Perhubungan dengan Anggaran Rp. 29.136.418.855,00
Realisasi Rp. 24.503.807.593,00 atau 84,1 %
33. Dinas Perikanan dengan Anggaran Rp. 14.156.278.405,00
Realisasi Rp. 11.887.210.368,00 atau 83,97%
34. Dinas Tenaga Kerja dengan Anggaran Rp. 16.377.888.751,00
Realisasi Rp. 13.743.121,00 atau 83,91 %

35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Anggaran Rp. 14.477.779.897,00 Realisasi Rp. 11.828.525.549,00 atau 81,7%
36. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan Anggaran Rp. 17.370.318.367,00 Realisasi Rp. 14.171.873.470,00 atau 81,59%
37. Sekretariat Daerah dengan Anggaran Rp. 160.148.523.250,00 Realisasi Rp. 129.445.132.529,00 atau 80,83%
38. Dinas Perdagangan dengan Anggaran Rp. 17.422.646.489,00 Realisasi Rp. 14.033.177.956,00 atau 80,55%
39. Dinas Pendidikan dengan Anggaran Rp. 463.064.013.203,00 Realisasi Rp. 366.166.554.109,00 atau 79,07%
40. Dinas Pertanian dengan Anggaran Rp. 108.770.095.054,00 Realisasi Rp. 83.501.166.413,00 atau 76,77%
41. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Anggaran Rp. 53.012.921.957,00 Realisasi Rp. 39.937.945.320,00 atau 75,34%
42. Kecamatan Bakarangan dengan Anggaran Rp. 4.670.414.631,00 Realisasi Rp. 3.511.100.272,00 atau 75,18%
43. Sekretariat DPRD dengan Anggaran Rp. 79.160.188.526,00 Realisasi Rp. 49.856.250.908,59 atau 62,98%
44. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Anggaran Rp. 746.362.010.220,00 Realisasi Rp. 456.476.761.200,00 atau 61,16%.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Selanjutnya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian

Besarnya jumlah dana Tugas Pembantuan yang diterima dari dana APBN dan APBD Provinsi oleh Dinas Pertanian tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.586.366.000,00 dengan realisasi Rp. 4.586.366.000,00 dengan persentase capaian kegiatan adalah 100 persen.

2. Dinas Ketahanan Pangan,

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin melaksanakan tugas Pembantuan dengan Instansi pemberi tugas pembantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.330.000,-. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 73.544.000,- dengan sisa pagu sebesar Rp. 6.786.000,- atau 91,55% realisasi.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Ketahanan Pangan tidak mencapai 100 persen karena waktu pelaksanaan yang singkat dan penentuan jadwal yang padat sehingga tidak bisa optimal dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu anggaran dari instansi pemberi yaitu Provinsi dibayarkan sampai masa tahun anggaran 2024.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Perlu adanya upaya-upaya yang lebih maksimal kembali dalam pelaksanaan aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin. Perekonomian dan pembangunan di

Kabupaten Tapin dapat merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat adalah harapan kita bersama.

Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua selaku pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan, dapat semakin memperkuat tekad dan komitmen yang telah terbangun dan terbina dengan sangat baik selama ini, antara pihak eksekutif dan pihak legislatif, untuk bersama – sama melakukan upaya dan kerja nyata dalam memberikan pengabdian terbaik guna membawa Kabupaten Tapin ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi.

Pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang terhormat ...

Demikian LKPJ ini kami sampaikan, semoga segala usaha yang telah kita lakukan dalam menjalankan program kegiatan pembangunan daerah selama tahun 2024 dapat memberikan hasil dan manfa'at yang berguna bagi kita semua, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin serta dapat menjadi landasan yang kokoh dalam rangka melanjutkan tahapan pembangunan berikutnya.

Akhirnya sebagai umat beragama, kita percaya bahwa segala keberhasilan yang telah kita capai ini tidak lain adalah merupakan suatu anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya wajib kita Syukuri semua nikmat yang telah kita terima dengan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Terima Kasih

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Warridlo Wainnayah,

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 **BUPATI TAPIN,**

H. Y. AMANI, S. Ak., MM

**PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KABUPATEN TAPIN
PADA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024**

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Nasional Tahun 2024		
1.		<p>Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024 "Lencana Bakti Desa Madya"</p> <p>Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten yang seluruh Desanya hanya terdiri dari 2 (dua) strata, yakni Desa "Mandiri" dan "Maju". Kabupaten Tapin menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalsel yang berhasil meraih Penghargaan Lencana Bakti Desa Madya dikarenakan tidak lagi mempunyai Desa berstatus "Berkembang".</p>
2.		<p>Penghargaan SAKIP Award Dengan Predikat BB.</p>
3.		<p>Penghargaan peringkat ke-3 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Nasional Tahun 2024		
4.		<p>Piagam Apresiasi atas Dukungan, Komitmen, dan Partisipasi Aktif dalam Program Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.</p>
5		<p>Penghargaan Innovative Government Awards Kategori "Sangat Inovatif" dari KEMENDAGRI hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Kamis, 5 Desember 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Nasional Tahun 2024		
6		<p>Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024</p> <p>Oleh Ketua Ombudman Republik Indonesia Di Jakarta</p> <p>Pada Tanggal 14 November 2024.</p>
7		<p>Piagam Penghargaan Terbaik II Kategori Instansi Layanan Pensiun PNS Berbasis SIASN se Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Tahun 2024.</p>
8		<p>Sertifikat Penghargaan atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAPF) Rate > 3 per 1000.000 penduduk < 15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubella) rate >2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada 07 November 2024 di Jakarta.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Nasional Tahun 2024		
9	 <p>The certificate is from the Indonesian Ministry of Health (MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA) and is awarded to the Tapin Regency Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). It recognizes the office as the best in its category for vaccine management through the SMILE application in the first half of 2024. The award was given in Jakarta on November 7, 2024, by Minister Budi G. Sadikin.</p>	<p>Tanda Penghargaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Terbaik dalam Pengelolaan Vaksin melalui Penerapan Aplikasi Sitem Monitoring Logistik Imunisasi secara Elektronik (SMILE) Regional Tengah Tahun 2024. Diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pada 07 November 2024 di Jakarta.</p>
10	 <p>The certificate is from the Indonesian Ministry of Health (MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA) and is awarded to the Tapin Regency Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin). It recognizes the office as the best functional health position category (Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) at the III level. The award was given in Jakarta on November 7, 2024, by Minister Budi G. Sadikin.</p>	<p>Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Pada 14 November 2024 di Jakarta.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Nasional Tahun 2024	
11	  <p>Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tapin</p>	<p>Piagam Penghargaan "Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 di Jakarta, 14 November 2024.</p>
12		<p>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kementerian PANRB.</p> <p>Indeks Pelayanan Publik 4,54 Kategori A (Pelayanan Prima).</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN																																																																																																																																												
	Tingkat Nasional Tahun 2024																																																																																																																																													
	<table><tr><th>No</th><th>DAFTAR KABUPATEN</th><th>IPP DINAS SOSIAL</th><th>IPP RSUD</th><th>IPP DISDUKAPIL</th><th>IPP KABUPATEN</th><th>KATEGORI</th></tr><tr><td>17.</td><td>Kabupaten Jepara</td><td>4,49</td><td>4,55</td><td>4,67</td><td>4,57</td><td>A</td></tr><tr><td>18.</td><td>Kabupaten Nganjuk</td><td>4,53</td><td>4,56</td><td>4,62</td><td>4,57</td><td>A</td></tr><tr><td>19.</td><td>Kabupaten Magetan</td><td>4,55</td><td>4,58</td><td>4,57</td><td>4,57</td><td>A</td></tr><tr><td>20.</td><td>Kabupaten Muji Banyuwani</td><td>4,52</td><td>4,62</td><td>4,56</td><td>4,57</td><td>A</td></tr><tr><td>21.</td><td>Kabupaten Banjarnegara</td><td>4,67</td><td>4,49</td><td>4,53</td><td>4,56</td><td>A</td></tr><tr><td>22.</td><td>Kabupaten Kulonprogo</td><td>4,30</td><td>4,80</td><td>4,59</td><td>4,56</td><td>A</td></tr><tr><td>23.</td><td>Kabupaten Garut</td><td>4,66</td><td>4,28</td><td>4,73</td><td>4,56</td><td>A</td></tr><tr><td>24.</td><td>Kabupaten Muara Enim</td><td>4,51</td><td>4,65</td><td>4,51</td><td>4,56</td><td>A</td></tr><tr><td>25.</td><td>Kabupaten Hulu Sungai Tengah</td><td>4,41</td><td>4,65</td><td>4,59</td><td>4,55</td><td>A</td></tr><tr><td>26.</td><td>Kabupaten Kediri</td><td>4,42</td><td>4,59</td><td>4,64</td><td>4,55</td><td>A</td></tr><tr><td>27.</td><td>Kabupaten Pematang</td><td>4,50</td><td>4,55</td><td>4,57</td><td>4,54</td><td>A</td></tr><tr><td>28.</td><td>Kabupaten Tapin</td><td>4,42</td><td>4,51</td><td>4,69</td><td>4,54</td><td>A</td></tr><tr><td>29.</td><td>Kabupaten Minahasa Selatan</td><td>4,46</td><td>4,55</td><td>4,6</td><td>4,54</td><td>A</td></tr><tr><td>30.</td><td>Kabupaten Subang</td><td>4,27</td><td>4,75</td><td>4,58</td><td>4,53</td><td>A</td></tr><tr><td>31.</td><td>Kabupaten Deli Serdang</td><td>4,47</td><td>4,65</td><td>4,47</td><td>4,53</td><td>A</td></tr><tr><td>32.</td><td>Kabupaten Kuantan Singingi</td><td>4,56</td><td>4,59</td><td>4,44</td><td>4,53</td><td>A</td></tr><tr><td>33.</td><td>Kabupaten Wonorebo</td><td>4,48</td><td>4,67</td><td>4,42</td><td>4,52</td><td>A</td></tr><tr><td>34.</td><td>Kabupaten Ogan Komering Ulu</td><td>4,35</td><td>4,70</td><td>4,51</td><td>4,52</td><td>A</td></tr><tr><td>35.</td><td>Kabupaten Pasuruan</td><td>4,38</td><td>4,60</td><td>4,57</td><td>4,52</td><td>A</td></tr></table> <div><p>Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kabupaten</p><div><ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Kabupaten Cilacap• Pemerintah Kabupaten Sidoarjo• Pemerintah Kabupaten Sleman• Pemerintah Kabupaten Jember• Pemerintah Kabupaten Banyuwani• Pemerintah Kabupaten Kudus• Pemerintah Kabupaten Sampang• Pemerintah Kabupaten Madiun• Pemerintah Kabupaten Sukoharjo• Pemerintah Kabupaten Jombang• Pemerintah Kabupaten Banyuwani• Pemerintah Kabupaten Klaten• Pemerintah Kabupaten Sumedang• Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur• Pemerintah Kabupaten Purwakarta• Pemerintah Kabupaten Wonorejo• Pemerintah Kabupaten Jember• Pemerintah Kabupaten Nganjuk• Pemerintah Kabupaten Magetan</div><div><ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Kabupaten Muji Banyuwani• Pemerintah Kabupaten Kulon Progo• Pemerintah Kabupaten Banjarnegara• Pemerintah Kabupaten Garut• Pemerintah Kabupaten Muara Enim• Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah• Pemerintah Kabupaten Kediri• Pemerintah Kabupaten Pematang• Pemerintah Kabupaten Tapin• Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan• Pemerintah Kabupaten Subang• Pemerintah Kabupaten Deli Serdang• Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi• Pemerintah Kabupaten Wonorebo• Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu• Pemerintah Kabupaten Pasuruan• Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir• Pemerintah Kabupaten Boyolali• Pemerintah Kabupaten Muji Rawas</div></div>	No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI	17.	Kabupaten Jepara	4,49	4,55	4,67	4,57	A	18.	Kabupaten Nganjuk	4,53	4,56	4,62	4,57	A	19.	Kabupaten Magetan	4,55	4,58	4,57	4,57	A	20.	Kabupaten Muji Banyuwani	4,52	4,62	4,56	4,57	A	21.	Kabupaten Banjarnegara	4,67	4,49	4,53	4,56	A	22.	Kabupaten Kulonprogo	4,30	4,80	4,59	4,56	A	23.	Kabupaten Garut	4,66	4,28	4,73	4,56	A	24.	Kabupaten Muara Enim	4,51	4,65	4,51	4,56	A	25.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,41	4,65	4,59	4,55	A	26.	Kabupaten Kediri	4,42	4,59	4,64	4,55	A	27.	Kabupaten Pematang	4,50	4,55	4,57	4,54	A	28.	Kabupaten Tapin	4,42	4,51	4,69	4,54	A	29.	Kabupaten Minahasa Selatan	4,46	4,55	4,6	4,54	A	30.	Kabupaten Subang	4,27	4,75	4,58	4,53	A	31.	Kabupaten Deli Serdang	4,47	4,65	4,47	4,53	A	32.	Kabupaten Kuantan Singingi	4,56	4,59	4,44	4,53	A	33.	Kabupaten Wonorebo	4,48	4,67	4,42	4,52	A	34.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,35	4,70	4,51	4,52	A	35.	Kabupaten Pasuruan	4,38	4,60	4,57	4,52	A	
No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI																																																																																																																																								
17.	Kabupaten Jepara	4,49	4,55	4,67	4,57	A																																																																																																																																								
18.	Kabupaten Nganjuk	4,53	4,56	4,62	4,57	A																																																																																																																																								
19.	Kabupaten Magetan	4,55	4,58	4,57	4,57	A																																																																																																																																								
20.	Kabupaten Muji Banyuwani	4,52	4,62	4,56	4,57	A																																																																																																																																								
21.	Kabupaten Banjarnegara	4,67	4,49	4,53	4,56	A																																																																																																																																								
22.	Kabupaten Kulonprogo	4,30	4,80	4,59	4,56	A																																																																																																																																								
23.	Kabupaten Garut	4,66	4,28	4,73	4,56	A																																																																																																																																								
24.	Kabupaten Muara Enim	4,51	4,65	4,51	4,56	A																																																																																																																																								
25.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,41	4,65	4,59	4,55	A																																																																																																																																								
26.	Kabupaten Kediri	4,42	4,59	4,64	4,55	A																																																																																																																																								
27.	Kabupaten Pematang	4,50	4,55	4,57	4,54	A																																																																																																																																								
28.	Kabupaten Tapin	4,42	4,51	4,69	4,54	A																																																																																																																																								
29.	Kabupaten Minahasa Selatan	4,46	4,55	4,6	4,54	A																																																																																																																																								
30.	Kabupaten Subang	4,27	4,75	4,58	4,53	A																																																																																																																																								
31.	Kabupaten Deli Serdang	4,47	4,65	4,47	4,53	A																																																																																																																																								
32.	Kabupaten Kuantan Singingi	4,56	4,59	4,44	4,53	A																																																																																																																																								
33.	Kabupaten Wonorebo	4,48	4,67	4,42	4,52	A																																																																																																																																								
34.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,35	4,70	4,51	4,52	A																																																																																																																																								
35.	Kabupaten Pasuruan	4,38	4,60	4,57	4,52	A																																																																																																																																								

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KABUPATEN TAPIN PADA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Provinsi Tahun 2024		
1.	 	<p>Penghargaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Partisipasi dan Dukungannya Dalam Pelaksanaan Akreditasi Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024</p>
2.	 	<p>Penghargaan DP3A Dalam Partisipasinya Menjadikan Desa Pilot Model Peningkatan Kualitas Keluarga Desa Suka Ramai Kecamatan Tapin Tengah Mendapatkan Penghargaan Kategori Utama Satu Sebagai Desa Peningkatan Kualitas Keluarga Terbaik Pada Kabupaten Kota Tingkat Provinsi Tahun 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
3.		<p>Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalsel Kategori Sangat Baik Dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dan Peringkat Ke IV Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota Se Provinsi Kalsel.</p>
4.		<p>Penghargaan Terbaik II "Fasilitasi Kekayaan Intelektual" dari Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Kalimantan Selatan Rabu, 19 Juni 2024. G'Sign Hotel Banjarmasin.</p>
5		<p>Penghargaan Pembangunan Daerah, Kabupaten/Kota Terbaik ketiga di Kalimantan Selatan dari Kementerian PPN/BAPPENAS RI Gedung Idham Khalid, Banjarbaru Rabu, 24 April 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
		
6		Piagam Penghargaan Atas Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelangi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarbaru. Pada Tanggal 03 Desember 2024.
7		Penghargaan Swastisaba Kabupaten Kota Sehat (Kategori Padapa) Diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Selasa, 12 November 2024 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Provinsi Tahun 2024		
8	 <p>The certificate is titled 'SERTIFIKAT PENGHARGAAN' and is addressed to 'Kabupaten Tapin'. It recognizes the achievement of surveillance and quarantine targets for 2024. The certificate is signed by H.J. RAUDATUL JANNAH, SKM., M.KES, NIP. 19700816 199203 2 009, who is the Head of the Provincial Health Office of Kalimantan Selatan.</p>	<p>Sertifikat penghargaan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target indikator sasaran strategis Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2024. Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Dinkes Prov. Kalsel.</p>
9	 <p>The certificate is titled 'SERTIFIKAT PENGHARGAAN' and is addressed to 'Kabupaten Tapin'. It recognizes the achievement of the National Polio Immunization coverage target of >95% for 2024. The certificate is signed by H.J. RAUDATUL JANNAH, SKM., M.KES, NIP. 19700816 199203 2 009, who is the Head of the Provincial Health Office of Kalimantan Selatan.</p>	<p>Sertifikat Penghargaan Kabupaten yang mencapai target Cakupan Pekan Imunisasi Nasional Polio >95 % Putaran 1/ Dosis ke 1 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Pada 09 Agustus 2024 bertempat di Dinkes Prov. Kalsel.</p>
10	 <p>The certificate is titled 'PIAGAM PENGHARGAAN FARMASI AWARD 2024' and is addressed to 'KABUPATEN TAPIN'. It recognizes Kabupaten Tapin as the 'JUARA I' (Winner) for the best community using medicine in 2023. The certificate is signed by H.J. RAUDATUL JANNAH, SKM., M.KES, NIP. 19700816 199203 2 009, who is the Head of the Provincial Health Office of Kalimantan Selatan.</p>	<p>JUARA 1 FARMASI AWARD 2024</p> <p>Provinsi (Kategori Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Terbaik 2022 se-Provinsi Kalimantan Selatan)</p> <p>Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Pada 25 Juni 2024 di Banjarmasin.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
11		<p>JUARA 1 FARMASI AWARD 2024</p> <p>Provinsi (Kategori Kabupaten/Kota dengan Tata kelola Kefarmasian sesuai standar pada FKTP Terbaik 2023 se-Provinsi Kalimantan Selatan. Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).</p> <p>Pada 25 Juni 2024 di Banjarmasin.</p>
12		<p>JUARA 1 FARMASI AWARD 2024</p> <p>Provinsi (Kategori Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan pengawasan sarana pelayanan Kefarmasian Terbaik 2023 se-Provinsi Kalimantan Selatan)</p> <p>Di berikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 25 Juni 2024 di Banjarmasin.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Provinsi Tahun 2024		
13		<p>JUARA 3 FARMASI AWARD 2024</p> <p>Provinsi (Kategori Kabupaten/Kota dengan pengendalian penggunaan antimikroba pada FKTP Terbaik 2023 se-Provinsi Kalimantan Selatan)</p> <p>Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 25 Juni 2024 di Banjarmasin.</p>
14		<p>JUARA 2 ASMAN TOGA 2024</p> <p>Provinsi (Kategori penilaian Asuhan Mandiri Tradisional melalui pemanfaatan Toga & Akupresur Kategori Pedesaan).</p> <p>Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 03 Desember 2024 Di Banjarmasin.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
15	 <p>The image shows a certificate titled 'Piagam Penghargaan' from the Governor of Kalimantan Selatan. It is awarded to 'KELOMPOK ASMAN TOGA ALAM ASRI' from 'Desa Padang Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin'. The certificate is for 'PERINGKAT I' (Category I) in the 'Kategori Daerah Pedesaan' (Rural Area Category). It recognizes the group for their traditional self-help nutrition group through Toga & Acupressure. The award was given in Banjarmasin on September 13, 2023, by Governor Sahbirin Noor.</p>	<p>JUARA 1 ASMAN TOGA 2023</p> <p>Provinsi (Kategori penilaian Asuhan Mandiri Tradisional melalui pemanfaatan Toga & Akupresure Kategori Pedesaan) Diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 13 November 2024. Di Banjarmasin.</p>
16	 <p>The image shows a certificate titled 'Piagam Penghargaan' from BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). It is awarded to 'SRI ENDANG DARMAWATI' from 'KABUPATEN TAPIN'. The certificate recognizes her as 'Juara 1' (1st Place) for 'Role Model Tempat Praktik Mandiri Bidan Dalam Pelayanan KB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024'. The award was given in Banjarmasin on July 2024 by the Head of BKKBN Kalimantan Selatan, Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc.</p>	<p>Juara 1 Role Model Tempat Praktik Mandiri Bidan dalam Pelayanan KB Provinsi Kalimantan Selatan. Diberikan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Pada Banjarmasin, Juli 2024.</p>
17	 <p>The image shows a certificate titled 'Piagam Penghargaan' from BKKBN. It is awarded to 'KABUPATEN TAPIN'. The certificate recognizes the county for 'Apresiasi Peningkatan Pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP) - Inovasi Mobil Kunjungi dan Layani Ibu setelah Bersalin (MOJANG BASTARI) Tahun 2024'. The award was given in Banjarmasin on July 2024 by the Head of BKKBN Kalimantan Selatan, Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc.</p>	<p>Apresiasi Peningkatan Pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP) - Inovasi Mobil Kunjungi dan Layani Ibu setelah Bersalin (Mojang Bastari) Tahun 2024.</p> <p>Diberikan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Banjarmasin, Juli 2024</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
		
18		Juara Harapan 1 Penguatan Promosi Kesehatan Reproduksi bagi Generasi Muda Ajang Kespro Kowula Muda (AKUKAMU) Tahun 2024 .Diberikan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Rabu 12 Juni 2024 di Banjarmasin.
19		Terbaik II Apresiasi Lomba BKB terbaik untuk BKB Siam Pontianak Kabupaten Tapin Diberikan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Pada Juli 2024 Di Banjarmasin .

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
20	 	<p>Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kabupaten Tapin Tahun 2024. Dengan hasil "Baik. Jakarta, 13 November 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
21		Juara 1 Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Yang Di Raih Oleh Karang Taruna Bina Muda Jaya Desa Pantai Cabe Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin Tahun 2024.
22		Juara 2 Lomba Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin Tahun 2024.
23		Penerimaan Penghargaan Juara 1, 2 Dan 3 Lomba Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
24		<p>Penghargaan BPMP Kalsel Award 2024 Kepada Kabupaten Tapin Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Sub-Indikator Terbanyak Dalam Penerapan Anggaran SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2025 Pada Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
25		<p>Penghargaan BPMP Kalsel Award 2024 Kepada Kabupaten Tapin Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Akses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
Tingkat Provinsi Tahun 2024		
26		<p>Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.</p>
27		<p>Penghargaan Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapin Atas Komitmen Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bahasa Daerah Sebagai Bagian Platform Merdeka Belajar Episode Ke 17 Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
28		<p>Penghargaan Harapan 1 Kelurahan Terbaik pada pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Kelurahan yang mendapatkan penghargaan adalah Kelurahan Binuang.</p>
29		<p>Penghargaan Kesenian Kabupaten Tapin "WAYANG TOPENG CARITA" Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2024.</p>

NO	GAMBAR PENGHARGAAN	KETERANGAN
	Tingkat Provinsi Tahun 2024	
30		Penghargaan Kesenian Kabupaten Tapin "KALAYANGAN DANDANG" Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2024.
31		Penghargaan Kesenian Kabupaten Tapin "BATIMUNG" Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2024.
32		Penghargaan Kesenian Kabupaten Tapin "KALAYANGAN DANDANG" Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2024.

